

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026
BULAN JUNI DI OPD PIt. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 10 Juli 2026

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 49,91 %

b. Keuangan = 10.278.769.125 (48,50%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		39.860.000			14.970.500		
1	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	39.860.000	46,10	40,39	14.970.500	(5,71)	pejalanan dinas menyesuaikan kebutuhan
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		53.760.000			7.682.500		
1	Rakor Data PPPA dan Dalduk KB/Rakor Data Pilah Perempuan dan Anak Jawa Tengah	53.760.000	46,59	14,38	7.682.500	(32,21)	Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Pilah ditunda karena menyesuaikan Rakor terkait data di Kemenpppa
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		15.000.000			1.320.000		
1	Rakor Data Kekerasan Perempuan dan Anak Jawa Tengah	9.050.000	37,63	0	0	(37,63)	Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Pilah

							ditunda karena menyesuaikan Rakor terkait data di Kemenpppa
2	Fasilitasi Pansus LKPJ Gubernur/Fasilitasi Rapat Data Kekerasan Perempuan dan Anak Jawa Tengah/FGD Urusan PPPA Dalduk KB	5.950.000	52,94	22,18	1.320.000	(30,76)	Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Pilah ditunda karena menyesuaikan Rakor terkait data di Kemenpppa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11.457.489.000			5.805.157.991		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.457.489.000	56	52	5.805.157.991	(4)	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		323.865.000			140.729.000		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	323.865.000	50,09	45,60	140.729.000	(4,49)	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		18.380.000			2.843.000		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.380.000	46,81	15,46	2.843.000	(31,35)	Menyesuaikan kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		71.068.000			3.432.000		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	71.068.000	8,65	4,99	3.432.000	(3,66)	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		3.845.000			865.500		
1	Pelaksanaan Pendataan Administrasi Kepegawaian	3.845.000	100	22,50	865.500	(77,50)	Belanja Perjalanan Dinas menyesuaikan undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		60.000.000			26.114.000		
1	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	60.000.000	48,40	46,80	26.114.000	(1,60)	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.844.000			578.000		
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.844.000	16	8	578.000	(8)	menyesuaikan kebutuhan publikasi kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		38.862.000			2.866.400		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	38.862.000	46,70	7,36	2.866.400	(39,34)	Menyesuaikan kebutuhan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2.982.000			1.506.000		
1	Fasilitasi Kegiatan	2.982.000	88	50,50	1.506.000	(37,50)	sisa perjalanan dinas berupa belanja transportasi darat akan digunakan untuk

							belanja Uang Harian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4.750.000			0		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.750.000	31,59	16,66	0	(14,93)	Anggaran senam belum terealisasi karena adanya WFH tiap hari Jumat
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		11.525.000			2.750.000		
1	Peningkatan Kapasitas Tim Teknis PUG Kabupaten Kota	11.525.000	100	23,86	2.750.000	(76,14)	menunggu jadwal Verifikasi PPE dari KemenPPPA
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		53.200.000			2.750.000		
1	Pemantauan dan Evaluasi PUG	40.800.000	52,36	19,94	2.750.000	(32,42)	Menunggu Petunjuk Teknis Pemantauan PUG dari KemenPPPA
2	Piloting Implementasi PUG	12.400.000	25	0	0	(25)	Akan diselenggarakan Juli
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi		27.005.000			2.200.000		
1	Penyusunan RAD PUG Provinsi	27.005.000	100	8,14	2.200.000	(91,86)	Sudah diselenggarakan mulai bulan Juni, belum terSPJ
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi							
sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi		687.938.000			206.970.000		
1	Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan	294.570.000	47,49	43,13	126.499.000	(4,36)	
2	Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan Perempuan	393.368.000	28,64	23,91	80.471.000	(4,73)	
peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi		162.421.000			82.129.160		
1	Pelatihan PPEP (Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan)	162.421.000	58	50,70	82.129.160	(7,30)	Efisiensi Perjalanan dinas.
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi		13.450.000			5.189.000		

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	19.220.000			12.972.000		
1	Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan hidup bagi AMPK	19.220.000	100	64,20	12.972.000	(35,80)	perjalanan dinas dilaksanakan sesuai kebutuhan
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	23.000.000			13.500.000		
1	Pelaksanaan advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak	23.000.000	67,40	58,74	13.500.000	(8,66)	peserta pelaksanaan advokasi pencegahan KtA tahap 1 pada bulan Februari 2026 adalah ASN sehingga tidak menerima uang harian peserta
	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	8.720.000			0		
1	Pelaksanaan FGD Penguatan kerjasama lintas sektor dalam perlindungan anak	8.720.000	33	0	0	(33)	pelaksanaan kegiatan di bulan Oktober. salah input target fisik di RKO
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	13.586.000			5.727.000		
1	Pelaksanaan Pelatihan Disiplin Positif bagi Lembaga Pendidikan	13.586.000	80,97	42,15	5.727.000	(38,82)	Kegiatan bekerjasama dengan Kemenag Kab. Wonogiri, namun tidak memberikan UH peserta
	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	13.667.000			1.733.000		
1	Pelaksanaan Advokasi PANDU CINTA (Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak)	13.667.000	68,73	12,68	1.733.000	(56,05)	Menunggu kesiapan materi PANDU CINTA
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	24.409.000			5.276.000		
1	Penurunan Angka Stunting dan AKI pada kelompok PIK Remaja di Kampung KB	24.409.000	33,55	21,85	5.276.000	(11,70)	Belanja perjalanan dinas belum terlaksana semua
	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	15.110.000			420.000		

1	Penyiapan kehidupan Berkeluarga, Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi dan Keterampilan Hidup Berkeluarga di Kelompok PIK Remaja	15.110.000	41,43	0	420.000	(41,43)	Kegiatan belum terlaksana pada bulan Juni 2026
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	11.410.000			6.992.000		
1	Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Kampung Keluarga Berkualitas	11.410.000	76,34	28,57	6.992.000	(47,77)	Biaya perjalanan dinas belum sepenuhnya terlaksana sampai Juni 2026
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	29.621.000			14.309.000		
1	Peningkatan Kapasitas bagi Kader BKB, BKR, BKL dalam Upaya Penurunan Angka Stunting	29.621.000	61,49	48,43	14.309.000	(13,06)	Perjalanan dinas belum sepenuhnya terlaksana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.270.000			2.250.000		
1	Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan	9.270.000	43,69	24,27	2.250.000	(19,42)	Menyesuaikan kebutuhan
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000			2.000.000		
1	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan	10.000.000	40	20	2.000.000	(20)	kebutuhan menyesuaikan kebutuhan korban yang dilayani
	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.750.000			0		
1	Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban kekerasan	6.750.000	22	0	0	(22)	kebutuhan menyesuaikan kebutuhan korban yang dilayani
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000			1.000.000		

1	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Anak Korban Kekerasan	10.000.000	40	10	1.000.000	(30)	Menyesuaikan kebutuhan korban
	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.270.000			3.420.000		
1	Layanan Gelar Kasus bagi Anak Korban Kekerasan	9.270.000	43,68	36,89	3.420.000	(6,79)	Menyesuaikan kebutuhan
	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	1.500.000			0		
1	Layanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin BPJS, Jamkesda, dan Sumber Pendanaan Lainnya Bagi Anak Korban Kekerasan	1.500.000	33	0	0	(33)	Menyesuaikan kebutuhan
	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000			1.000.000		
1	Layanan Spesifik Untuk Pemulihan Korban Bagi Anak Korban Kekerasan	3.500.000	42,87	28,58	1.000.000	(14,29)	Menyesuaikan kebutuhan
Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatif s/d Bulan ini :		44	0	0			
Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :		0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

-

Upaya

-

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Penurunan Angka Stunting dan AKI pada kelompok PIK Remaja di Kampung KB dengan lokus daerah dengan anemia tinggi di Jawa Tengah (KS);
2. Penyiapan kehidupan Berkeluarga, Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi dan Keterampilan Hidup Berkeluarga di Kelompok PIK Remaja by Zoom (KS);
3. Fasilitasi Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas untuk Mendukung Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di 3 lokasi (Dalduk);
4. Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) daring (Dalduk);
5. Uji Publik Dokumen PJPJ Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 (Dalduk);
6. Safari Pelayanan KB MKJP di Kab. Sukoharjo (KB);
7. Persiapan penggerakan KB kontrasepsi sejuta akseptor bersama mitra bkkbn (KIE);
8. Rakor Advokasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (PA);
9. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan ABHÂ (PA);
10. Dolan Bareng Bunda FAN (PHA);
11. Penguatan kader keluarga dan pembentukan forum anak desa (Puspaga PHA);
12. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KtP dan TPPO (PP);
13. Peningkatan Kapasitas tentang Manajemen Kasus Bagi Petugas Penyedia Layanan (DAK) (Kab. Kendal) (PP);
14. Pelatihan PPEP tahap 3 di Pemalang dan Wonosobo (KG);
15. Penyusunan RAD PUG OPD Provinsi (KG);
16. Pendidikan Politik bagi Perempuan untuk Mendorong Kesetaraan dan Keadilan Gender (Aspirasi)(KG);
17. Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam berbagai bidang Pembangunan (KG);
18. Penguatan peran serta Dharma Wanita (pertemuan rutin DWP) (KG);
19. Ngopi Penak;
20. Pengembangan kapasitas petugas penunjang layanan perempuan dan anak (KG);
21. Kegiatan bimtek anti korupsi (UK);
22. Rapat Pengendalian Internal (Program);
23. Layanan korban perempuan dan anak (rutin)Â

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Memperhatikan pencapaian target-target indikator dalam RPJMD 2025-2029;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Juni 2026, untuk menjadikan pemeriksaan.

Semarang, Jumat, 10 Juli 2026

Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



FAISALUK LI SEPTI YANI, S.Sos.M.Si

NIP. 197109192003122004